



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Implementasi Peraturan Walikota Kota Bandung No.281
Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pemberdayaan dan
Pembangunan Kewilayahan tahun 2015 (Studi Kasus :
Kecamatan Panyileukan)**

Skripsi

Oleh

Mushaf Isnain Perdana

2012310017

Bandung

2017



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Implementasi Peraturan Walikota Kota Bandung No.281
Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pemberdayaan dan
Pembangunan Kewilayahan tahun 2015 (Studi Kasus :
Kecamatan Panyileukan)**

Skripsi

Oleh

Mushaf Isnain Perdana

2012310017

Pembimbing

Susana Ani Berliyanti Dra., M.Si

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



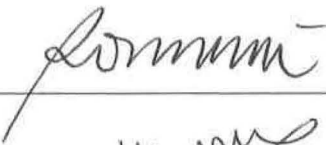
Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Mushaf Isnain Perdana
Nomor Pokok : 2012310017
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Kota Bandung No. 281 Tahun 2015 Tentang Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2015 (Studi Kasus Kecamatan Panyileukan)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 16 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Maria Rosarie Harni T., S.Ip., M.Si

: 

Sekretaris

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si

: 

Anggota

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mushaf Isnain Perdana

NPM : 2012310017

Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Perwal Kota Bandung No.281 Tahun 2015
mengenai Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan
Kewilayahan tahun 2015 (Studi Kasus : Kecamatan Panyileukan)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi atau penelitian ini adalah karya ilmiah sendiri. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila ada ketidakbenaran di dalam pernyataan ini.

Bandung, 7 Januari 2017



Mushaf Isnain Perdana

Abstrak

Nama : Mushaf Isnain Perdana
NPM : 2012310017
Judul : Implementasi Perwal Kota Bandung No.281 Tahun 2015
mengenai Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan
Kewilayahan tahun 2015 (Studi Kasus : Kecamatan Panyileukan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan implementasi Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK). Hal ini penting dipelajari karena Perwal ini merupakan kebijakan baru dan diharapkan mampu mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam melaksanakan PIPPK yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat sehingga terjadi pemerataan pembangunan di Kota Bandung. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Panyileukan karena Kecamatan Panyileukan merupakan Kecamatan yang mendapat Juara pertama dalam PIPPK Awards 2015 dalam kategori penyerapan anggaran terbanyak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan teori Implementasi Edward III dengan melihat faktor sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi dari pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Panyileukan. Sehingga dari analisa tersebut kita dapat mempelajari best practice dari implementasi kebijakan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan dana yang cukup, penyerapan dana yang tinggi, terdapat transmisi komunikasi, terdapat komunikasi yang jelas, terdapat komunikasi yang konsisten, terpenuhinya aspek kognitif, terpenuhinya aspek afektif, terdapat SOP yang membantu dan Fragmentasi yang kecil mewujudkan keberhasilan Implementasi PIPPK Kota Bandung Tahun 2015 di Kecamatan Panyileukan

Kata Kunci : Implementasi, Pembangunan, Pemberdayaan

Abstract

Name : Mushaf Isnain Perdana
NPM : 2012310017
Title : *Implementation of Bandung's Mayor Regulatory Number 281 2015 regarding Innovation Program for Empowerment and Regional Development in 2015 (Case Study: Panyileukan District)*

This study aims to determine what factors led to the successful implementation of the Innovation Program for Empowerment and Regional Development (PIPPK). It is important to learn because mayor's Regulatory is a new policy and is expected to increase public participation in the conduct of development resulting in the distribution of development in the city of Bandung. In this study, researchers conducted a study in the Panyileukan District. Panyileukan is the District who got the first position in PIPPK Awards 2015 in the category of the highest budget absorption. To answer this question the researchers used the theory of Edward III Implementation by looking at factors resources, communications, disposition, and the bureaucratic structure of the implementation PIPPK in Panyileukan District. So from this analysis we can learn the best practices of implementation of the policy.

The results of this study show that with sufficient funds, fund absorption is high, there is a communication transmission, there is clear communication, there is a consistent communication, the fulfillment of the cognitive aspect, the fulfillment of the affective aspect, there SOP were helpful and little fragmentation can realize the success of the implementation PIPPK City Bandung 2015 in District Panyileukan.
Keywords: Implementation, Development, Empowerment

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan kurniaNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Kota Bandung No.281 Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2015 (Studi Kasus : Kecamatan Panyileukan)”.Skripsi ini merupakan penelitian ilmiah untuk memenuhi syarat akhir dalam mencapai gelar Sarjana jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan.Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, banyak kesalahan yang penulis perbuat.Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran membangun guna membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Penulis mengucapkan terimakasih pada kesempatan kali ini kepada Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis, kepada orang tua tercinta Achmad Haldani dan Ernawati yang selalu mendoakan, mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat dan kasih sayang tiada henti kepada penulis. Saya ucapkan terimakasih pula kepada Ibu Dra. Susana Ani Berliyanti selaku Dosen Pembimbing dan yang selalu sabar dalam membimbing dan selalu memberikan waktu kepada saya dalam proses pembuatan karya ilmiah ini, berkat beliau saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik dan benar. Tidak lupa juga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Tutik Rachmawati, S.IP, MA selaku Ketua Prodi Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

2. Bapak Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan Dosen Wali.
3. Ibu Susana Ani Berliyanti Dra., M.Si selaku Dosen Pembimbing.
4. Bapak Hubertus Hasan, Ibu Gina Ningsih Yuwono, Ibu Indraswari, Bapak Pius Sugeng, Bapak Pius Suratman Kartasmita, Bapak Deni M, Bapak Ulber Silalahi, Bapak Nugraha Jaya Praja, Bapak Dudung Sumahdumin, Bapak Meindy Mursal, Bapak Andoko dan jajaran dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ibu Herliani selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Panyileukan dan Bapak Adhi selaku staff Seksi Pemerintahan Kecamatan Panyileukan, terimakasih atas waktu dan tenaga yang diluangkan untuk menjadi Narasumber dalam penelitian ini.
6. Team Dago Anggi, Wisnu, Agung, Kiki, Atun, Edo, Isal yang selalu menemani dan menghibur saya dalam suka maupun duka
7. Rizal Gokong, Icad, dan Rasyad kawan seperjuangan dari SMA,.
8. teman KKL Lidia, David, Rika, Odi, pengalaman berharga bisa bekerjasama dan bertahan hidup dengan kalian selama 30 Hari, semoga kita bisa bersua Lagi.
9. Team Kontrakan Disya, Eceu, Devi, Mamih, Step, Cecil, Pupu, dan yang lain.
10. Kawan-kawan seperjuangan dari awal kuliah Gilang, Wisnu, David, Anggi, Kiki, Agung, Isal, Mail, Vijay, Disya, Eceu, Rika, Lidia, Caca, Novi, Ndit dan Seluruh Kawan-kawan Administrasi Publik 2012 yang lain yang tidak bisa disebut satu persatu. Sukses selalu untuk kalian semua.

11. Kawan- kawan IPS 3 yang masih sering main, Robin, Hanafi, Teguh, Ichi, Dwi dan yang lain.

12. Serta semua pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalian adalah salah satu alasan mengapa karya ini bisa diselesaikan.

Semoga Allah SWT dapat membalas semua jasa pihak-pihak yang selama ini membantu saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Bandung, 7 Januari 2017

Mushaf Isnain Perdana

Daftar Isi

Abstrak.....	i
<i>Abstract</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Tabel.....	ix
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah.....	10
1.4 Pertanyaan Penelitian.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Kegunaan Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
2.1 Konsep Kebijakan Publik.....	13
2.2 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung.....	18
2.2.1 Definisi PIPPK.....	18
2.2.2 <i>Stakeholder</i> PIPPK.....	18
2.2.3 Jenis Kegiatan PIPPK.....	19
2.2.4 Ruang lingkup kegiatan PIPPK.....	19
2.2.5 Mekanisme Pelaksanaan PIPPK.....	20
2.2.6 Peran Stakeholder dalam PIPPK.....	21
2.3. Implementasi Kebijakan Publik.....	25
2.4 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik.....	30
2.5 Fokus Implementasi.....	31
2.6 Model Penelitian.....	40
BAB III.....	41

3.1 Rancangan Penelitian.....	41
3.2 Lokasi Penelitian.....	42
3.3 Peran Peneliti.....	43
3.4 Sumber Data.....	43
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.6 Analisis Data.....	47
3.7 Instrumen Penelitian.....	49
3.8 Pengecekan Keabsahan Data.....	50
3.9 Operasional Variabel.....	52
BAB IV.....	56
4.1 Profil Kecamatan Panyileukan.....	56
4.1.1 Data Statis.....	56
4.1.2 Data Dinamis.....	61
4.2 Fungsi Kecamatan Dalam PIPPK.....	62
BAB V.....	63
5.1 Analisis Kualitatif.....	63
5.2 Mengukur Keberhasilan Implementasi.....	63
5.3 Sumber Daya.....	76
5.4 Tingkat Disposisi.....	82
5.5 Komunikasi.....	87
5.6 Struktur Birokrasi.....	91
5.7 Faktor lain.....	95
BAB VI.....	97
6.1 Kesimpulan.....	97
6.2 Saran.....	101
Daftar Pustaka.....	103

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Peran Stakeholder dalam PIPPK.....	21
Gambar 2.2 Faktor penentu keberhasilan implementasi menurut Edward III.....	39
Gambar 5.1 Sosialisasi PIPPK.....	66
Gambar 5.2 Sosialisasi PIPPK.....	67
Gambar 5.3 Mapay Lembur	68
Gambar 5.4 Monev PIPPK.....	69
Gambar 5.5 PIPPK Awards.....	86
Gambar 5.6 Stand Kecamatan Panyileukan dalam PIPPK Awards 2015.....	96

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Data Penggunaan Areal Tanah Kecamatan Panyileukan.....	57
Tabel 4.2 Kawasan Perencanaan dalam Lingkup Kecamatan panyileukan.....	58
Tabel 4.3 Data Kondisi Kantor Kecamatan.....	60
Tabel 4.4 Kelurahan dan Jumlah RT / RW.....	61
Tabel 5.1 Contoh Proposal Kegiatan Pembangunan.....	71
Tabel 5.2 Contoh Proposal Kegiatan PIPPK.....	72
Tabel 5.3 Rekapitulasi PIPPK Kel. Mekarmulya.....	73
Tabel 5.4 Rekapitulasi PIPPK Kel. Cipadung Kulon.....	74
Tabel 5.5 Anggaran PIPPK Cukup Sebagai Stimulan.....	77
Tabel 5.6 Tingginya Partisipasi dan Kemampuan LKK dalam Melaksanakan PIPPK.....	79
Tabel 5.7 Realisasi PIPPK Kecamatan Panyileukan tahun 2015.....	80
Tabel 5.8 Pemahaman Pelaksana PIPPK.....	83
Tabel 5.9 Terdapat Sosialisasi PIPPK di Kecamatan Panyileukan.....	88
Tabel 5.10 Manfaat Juknis PIPPK di Kecamatan Panyileukan.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kemerdekaan yang telah diraih harus dijaga dan diisi dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Hal tersebut sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. UU ini diharapkan membuka ruang agar terjadinya pemerataan pembangunan di seluruh daerah yang dianggap tertinggal.

Dari UU tersebut menyiratkan bahwa tujuan dari pembangunan adalah kemakmuran bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk menciptakan kemakmuran bersama merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia. Hal tersebut sesuai dengan Hipotesis Kusnets yang menyatakan bahwa sejalan dengan waktu, ketidakmerataan (*inequality*) akan meningkat akan tetapi kemudian akan menurun karena adanya penetesan ke bawah (*trickle down effect*), sehingga kurva akan berbentuk seperti huruf U terbalik (*Inverted U*). Akan tetapi pada kenyataannya penetesan ke bawah (*trickle down effect*) tidak selalu terjadi, sehingga pemerataan pembangunan tidak terjadi.¹ Oleh

¹ <https://www.yohanli.com/upaya-pemerataan-pembangunan.html>. Upaya pemerataan pembangunan, Diakses pada 18/11/16 pukul 15:45

karena itu menurut hipotesa peneliti belum ada upaya yang berhasil dari pemerintah untuk pemerataan pembangunan sehingga tidak terjadi (*Trickle down effect*). Karena perlu ada pemicu dari pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dibutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas untuk melakukan pembangunan bagi dirinya sendiri dan sekaligus lingkungan sekitarnya. Atau dalam kata lain masyarakat harus berdaya dan pemerintah harus mampu memfasilitasinya.

Memberdayakan Masyarakat merupakan suatu kewajiban dari suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang berazaskan Pancasila, pemberdayaan adalah usaha untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama yang dinyatakan dalam Sila ke Lima dari Pancasila yaitu, “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan juga dinyatakan dalam tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Memajukan Kesejahteraan umum merupakan agenda utama tiap kabinet dalam membuat kebijakan akan tetapi permasalahan ini tidak pernah selesai, Kondisi ini menjadi indikator bahwa masyarakat banyak belum berperan sebagai subyek dalam pembangunan nasional.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka kita perlu mengetahui apa yang disebut dengan pemberdayaan. Menurut Ginanjar kartasasmita Pemberdayaan atau *empowerment* merupakan suatu konsep pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik yang bercirikan *people centered, participatory, empowering and sustainable*, atau dengan kata lain pemberdayaan yakni upaya membangun daya masyarakat dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran

akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam terminologi pembangunan, secara praktis diartikan sebagai upaya untuk memampukan, melibatkan, dan memberikan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan. Pada hakekatnya pemberdayaan berada pada diri manusia sedangkan faktor diluar diri manusia hanyalah berfungsi sebagai stimulus, perangsang munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk memberdayakan dirinya sendiri, untuk mengendalikan dirinya sendiri, untuk mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya.² Jadi memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, yang merupakan upaya memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Sumodiningrat, arah pemberdayaan masyarakat secara umum berpangkal pada dua sasaran utama yaitu, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, serta mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan.³ Sedangkan menurut Prijono dan pranarka, untuk melepaskan belenggu kemiskinan dan mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan, maka proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu inisial,

² Ginanjar Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*, (Jakarta: Bappenas, 1996) hlm.144

³ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998) hlm. 177

partisipatoris, dan emansipatori. Inisial diartikan sebagai dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat. Partisipatori diartikan dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat. Sedangkan emansipatori diartikan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama rakyat.⁴ Dengan demikian peran serta dan fungsi pemerintah dalam mensejahterakan dan memandirikan masyarakat sangat diperlukan.

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan yang diutarakan oleh Ryaas Rasyid dalam Muhadam. Ryaas membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*).⁵ Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat. Peningkatan kreatifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi didasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya

⁴ Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka (eds). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta, CSIS, 1996) hlm. 3

⁵ Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep, dan Pengembangannya*. (Jakarta: Rajawali Pers.2010) hlm. 32

manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat dibutuhkan. Ndraha menyebutkan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau pelayanan, dan fungsi sekunder atau pemberdayaan. Fungsi primer secara terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. Sebaliknya fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari *rowing* (pengaturan) ke *steering* (pengendalian). Fungsi sekunder atau pemberdayaan secara perlahan dapat diserahkan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.⁶ Pemerintah berkewajiban untuk secara terus-menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan keberdayaannya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah. Oleh sebab itu, pemberdayaan mampu mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Seiring dengan itu, hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta dengan keterbatasan yang dimilikinya, maka secara perlahan masyarakat mampu untuk hidup mandiri mencukupi kebutuhannya.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta

⁶ Taqliziduhu Ndraha. *Budaya Organisasi*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2003) Hlm. 76

merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain :⁷

1. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan

⁷ Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep, dan Pengembangannya*. (Jakarta: Rajawali Pers.2010) hlm. 36

masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Salah satu cara untuk menjalankan fungsi tersebut pada tanggal 31 Maret 2015 Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung membuat program baru untuk membangun kota Bandung yaitu Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Program ini didasari oleh Peraturan Wali Kota Bandung No 281/2015. PIPPK merupakan salah satu refleksi dari gagasan Walikota Bandung untuk meningkatkan tugas dan fungsi peran aparatur kewilayahan beserta seluruh anggota kemasyarakatan kelurahan dalam rangka mempercepat rangka pembangunan melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. PIPPK merupakan fokus pengembangan kewilayahan sebagai bagian desentralisasi kewilayahan di kecamatan. Karena wilayah kecamatan memiliki tiga fungsi utama, antara lain sebagai model program sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien untuk senantiasa mengedepankan kesejahteraan masyarakat, sebagai arena pengembangan kehidupan ekonomi kerakyatan dan sebagai arena pengembangan demokrasi di tingkat kota sebagai arena politik yang bisa menghubungkan politik setingkat kelurahan dengan kota sebagai pusat pengambilan keputusan politik.

Dalam Peraturan Wali Kota Bandung No 281/2015 disebutkan, maksud dan tujuan dilaksanakannya program PIPPK ini, yaitu untuk meningkatkan tugas, peran,

dan fungsi aparat kewilayahan beserta seluruh stakeholder lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat. Dalam Pelaksanaan PIPPK diharapkan dapat mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam melaksanakan PIPPK berbasis pada pemberdayaan masyarakat.⁸ Output PIPPK di tahun pertama berfokus pada infrastruktur dan kebersihan. Lalu di tahun selanjutnya akan memaksimalkan Pemberdayaan ekonomi. Dalam Buku Sosialisasi PIPPK Kota Bandung 2015 dipertegas, program ini didasari semangat desentralisasi, inovasi, dan kolaborasi. Berbagai program pembangunan akan diamanatkan kepada setiap kelurahan berdasarkan kebutuhan masing-masing kelurahan, atas dasar kerja sama antara Pemkot Bandung dengan seluruh masyarakat Kota Bandung.⁹

Program PIPPK telah dimulai sejak bulan Maret tahun 2015. Jadi bisa dibilang program ini sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun. Dalam berita yang penulis dapatkan dalam website resmi kota bandung, terdapat berita mengenai peluncuran program PIPPK tahun 2016. dalam acara tersebut terdapat sebuah penghargaan kepada lima kecamatan yaitu Kecamatan Panyileukan, Cibiru, Rancasari, Bandung Wetan serta Babakan Ciparay. Penghargaan diberikan kepada lima kecamatan tersebut karena dianggap berhasil dalam menjalankan program PIPPK tahun

⁸ Perwal Kota Bandung No.281 Tahun 2015 Pasal 2

⁹ Juknis PIPPK Tahun 2015

sebelumnya. Selain itu, terdapat penghargaan untuk penyerapan anggaran terbanyak dan penghargaan tersebut diberikann kepada Kecamatan Panyileukan.¹⁰

Dengan diadakannya penghargaan tersebut kita dapat mengetahui bahwa ternyata program PIPPK ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh Kecamatan Panyileukan. Sehingga dari berita tersebut penulis ingin mengetahui pelaksanaan PIPPK 2015 yang dilakukan Kecamatan Panyileukan dan Ingin mengetahui apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan sesuai Tujuan yang tercantum dalam Perwal No. 281 tahun 2015.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari data sekunder tersebut dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

“Terdapat indikasi bahwa telah terjadi sinergitas kinerja antara aparaturn kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Panyileukan”

Dalam penelitian ini penulis memilih salah satu sampel kecamatan dari kelima kecamatan penerima penghargaan untuk diteliti yaitu kecamatan Panyileukan dengan alasan karena Kecamatan Panyileukan menduduki peringkat pertama dalam hal penyerapan anggaran.

¹⁰ <https://portal.bandung.go.id/posts/2016/02/11/dOAE/launching-pipk-2016> Pengumuman PIPPK Awards dan Launching PIPPK 2016, Website Resmi kota Bandung. diakses pada 18/11/16 pukul 15.30

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut dapat dilihat bahwa Program Inovasi Pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan ini merupakan program baru yang memiliki semangat desentralisasi yang tinggi yang mungkin dapat menyelesaikan permasalahan ketimpangan pembangunan di Kota Bandung. Hal ini merupakan realisasi janji politik Walikota Ridwan Kamil yang bisa dibilang sebagai inovasi atau terobosan dalam suatu program.

Dari data sekunder yang didapat dalam media elektronik setelah proram PIPPK ini berjalan selama satu tahun terdapat penghargaan yang diberikan kepada Kecamatan- Kecamatan yang dianggap berhasil dalam melaksanakan PIPPK.

Dengan diadakannya penghargaan tersebut kita dapat mengetahui bahwa ternyata program PIPPK ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh beberapa kecamatan dan kelurahan tersebut. Sehingga dari berita tersebut penulis ingin mengetahui pelaksanaan PIPPK 2015 di Kecamatan Panyileukan dan ingin mengetahui apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan sesuai Tujuan yang tercantum dalam Perwal No. 281 tahun 2015 yaitu mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam melaksanakan PIPPK yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat..

1.4 Pertanyaan Penelitian

- Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan PIPPK 2015 di Kecamatan panyileukan dinyatakan berhasil?

1.5 Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan pelaksanaan Program PIPPK tahun 2015 di kecamatan Panyileukan sehingga kita dapat mempelajari *best practice* dari kecamatan tersebut.

1.6 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian tersebut, dapat memberikan kegunaan penelitian sebagai berikut.

- Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan introspeksi bagi kecamatan Panyileukan karena dalam penelitian ini melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PIPPK di kecamatan Panyileukan. Disamping itu penelitian ini bisa menjadi acuan atau *role model* dalam pelaksanaan PIPPK bagi kecamatan lain.
- Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah penelitian ini dapat memperkaya wawasan dalam disiplin ilmu Administrasi Publik.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini membahas Implementasi Peraturan Walikota Kota Bandung No.281 Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2015 di Kecamatan Panyileukan. Untuk itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas enam bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV

Gambaran Umum, Bab V Pembahasan Hasil Penelitian, Bab VI Kesimpulan dan
Saran.